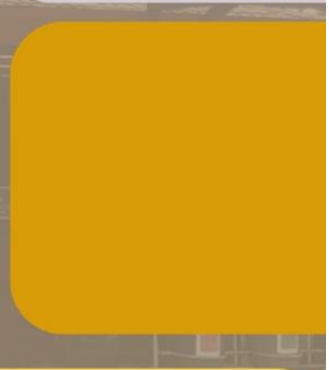
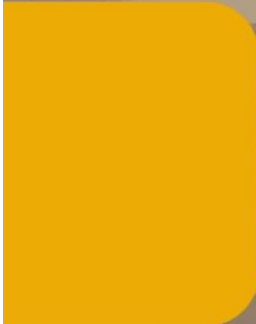




disdukcapi
Kabupaten Pesisir Selatan

RENCANA KERJA TAHUN 2026

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



Instagram: @disdukcapiPesisirselatan
Whatsapp: 0823-6347-5396
Email: dukcapilpessel@gmail.com

Website: wwdisdukcapi.pesisirselatankab.go.id
Facebook: Disdukcapi Pesisir Selatan
Alamat: Jl. Pemuda No. 1 Painan

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan dokumen Penetapan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Penyusunan dokumen Penetapan Renja Tahun 2026 ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan lanjutan atas dokumen Renja Tahun 2026 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, dimana telah dilakukan penyesuaian pagu indikatif anggaran berdasarkan kebutuhan belanja prioritas pada Tahun Anggaran 2026 yang tetap dalam koridor dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas periode tahun 2025-2029 yang menjadi bagian dari rencana pembangunan Pemerintah Daerah Pesisir Selatan.

Pada tahapan penyusunan Penetapan Renja Tahun 2026 ini, pengalokasian pagu anggaran telah mulai mengakomodir kebijakan perencanaan penganggaran berdasarkan kebijakan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat dengan memperhatikan kondisi terkini baik dari kebijakan umum pemerintahan dan/atau kebijakan perencanaan keuangan. Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan dalam tahapan Penetapan Renja Tahun 2026 ini tetap dalam rangka merealisasikan target kinerja yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang melaksanakan tugas pemerintahan urusan wajib non pelayanan dasar yakni urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dokumen Penetapan Renja Tahun 2026 merupakan kerja kolaborasi dari semua unsur yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan terlibat dalam penyusunan dokumen Penetapan Renja Tahun 2026 ini diucapkan

terima kasih, dan semoga dokumen ini dapat memberi manfaat bagi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Pesisir Selatan.

Painan, 10 November 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



BERISKHAN, S.Sos.M.Si
NIP. 19720302 199302 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
 BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	20
2.4 Review Terhadap Awal RKPD.....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	35
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	37
3.3 Program dan Kegiatan	38
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	48
 BAB V PENUTUP	60

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024.....	5
Tabel	2.2	Perbandingan Pagu Renja, APBD Murni dan APBN TA 2024.....	6
Tabel	2.3	Reakpitulasi Pagu APBD 2025	7
Tabel	T.C 29	Rakapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Dukcapil dan Pencapaian Renstra	10
Tabel	T.C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	19
Tabel	2.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Dukcapil	21
Tabel	T.C.3.1	Review Terhadap Rancangan Rencana Kerja Dukcapil Tahun 2026.....	23
Tabel	2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026.....	34
Tabel	3.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Dukcapil Tahun 2026.....	38
Tabel	3.2	Program dan Pagu Anggaran Renja Dinas Dukcapil Tahun 2026.....	39
Tabel	3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026	40
Tabel	4.1	Rumusan Rencana Pendanaan Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan Dinas Dukcapil Tahun 2026.....	50
Tabel	4.2	Pendanaan Indikator Kinerja Utama	59

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 - 2029, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diikuti penyusunan sasaran dan kebijakannya, penyusunan program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2025-2029. Renstra tersebut dijabarkan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2026 dan Perkiraan Maju Tahun anggaran 2027

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6792);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Rprovinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomro 155, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 6970);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomro 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Recana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025;
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah tersusunnya rencana kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 yang terurai secara tepat dan terarah pada Tingkat kebijakan, program dan kegiatan hingga indikator kinerja serta rencana dan anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap RKPD Kabupaten Pesisir Selatan dari hasil evaluasi tahun berjalan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan pada RKPD 2026.

Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 secara terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta permasalahan yang perlu segera ditangani.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan uraian tentang Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2025

Berisikan uraian tentang Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun berjalan dan Analisa Kinerja Pelayanan OPD.

BAB III : RENCANA KERJA DA PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Berisikan Rencana Kerja Tahun 2026.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan 2026, yang tersusun atas dukungan dan partisipasi dari berbagai komponen masyarakat (stakeholder) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II
EVALUASI RENJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SAMPAI DENGAN TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Sampai dengan Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahapan finalisasi Renja Tahun 2024 (Renja Penetapan), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan alokasi pagu anggaran renja sebesar Rp.5.343.766.554.000,- yang dibagi pada 4 (empat) program urusan dan 1 (satu) program penunjang dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Pagu Renja 2024

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota	3.935.041.004
2	Program Pendaftaran Penduduk	1.284.337.500
3	Program Pencatatan Sipil	36.000.000
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	75.265.550
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	13.118.500
JUMLAH PAGU RENJA		5.343.766.554

Sumber data: Renja Penetapan 2024 Disdukcapil

Dalam tahapan penganggaran sampai ditetapkan APBD 2024 (murni) anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan sebesar 9,60% atau sebesar Rp.512.992.937,- menjadi Rp. 4.830.773.617,-. Pada tahapan APBD-P 2024 mengalami peningkatan anggaran sebesar 1,6% dari APBD murni atau sebesar Rp.80.000.000,- menjadi Rp. 4.910.773.617. Jika dibandingkan dengan pagu renja, maka pagu APBD-P 2024 mengalami penurunan 8,10% atau sebesar Rp.432.992.937,-. Secara detail per program, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Perbandingan Pagu Renja, APBD Murni, dan APBD Perubahan TA 2024

NO	PROGRAM	PAGU		
		RENJA (Rp)	MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	3.935.041.004	4.720.350.747	4.910.773.617
2	Program Pendaftaran Penduduk	1.284.337.500	35.000.000	-
3	Program Pencatatan Sipil	36.000.000	35.000.000	-
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	75.265.550	40.422.870	-
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	13.118.5000	-	-
JUMLAH		5.343.766.554	4.830.773.617	4.910.773.617

Sumber data: Renja Penetapan, DPA, dan DPA-PTA 2024 Disdukcapil

APBD-P Tahun Anggaran 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai dokumen akhir pedoman pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada tahun berkenaan, kinerja anggaran secara keseluruhan dapat dilaksanakan dan direalisasikan tanpa kendala yang berarti. Hal ini berdasarkan tingkat realisasi keuangan sebesar 92,04% atau sebesar Rp. 4.519.933.798,- dengan sisa anggaran Rp. 390.839.819,- serta realisasi fisik pelaksanaan kegiatan 100%. Penyumbang terbesar sisa anggaran berasal dari Sub Kegiatan 2.12.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yakni sebesar Rp. 366.005.238,- atau 93,65% dari total sisa anggaran dinas yang berjumlah Rp. 390.839.819,-. Hal ini disebabkan adanya mutasi ASN dan ASN yang telah pensiun pada akhir tahun 2024

Selain itu terdapat 2 (dua) sub kegiatan lainya dengan realisasi dibawah 90% yaitu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 68,52% atau Rp. 3.700.000 dari anggaran sub keg. Sebesar Rp. 5.400.000, tidak terealisasinya anggaran disebabkan tidak dibayarkannya honorarium belanja publikasi. Kemudian sub keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya juga hanya terealisasi sebesar

89,51% atau. Rp. 67.092.000 dari anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 74.953.800 pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/kota. Tidak terealisasinya anggaran pada rincian belanja ini disebabkan karena selisih harga perkiraan dengan harga pasar.

Pada APBD Tahun Anggaran 2025 (PBD murni), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.052.707.571,- yang dibagi pada 4 (empat) program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rekapitulasi Pagu APBD 2025

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	4.471.707.571
2	Program Pendaftaran Penduduk	26.592.750
3	Program PencatatanfSipil	521.992.750
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	32.473.800
5	Program Pengelolaan ProfilfKependudukan	-
JUMLAH PAGU APBD		5.052.707.571,-

Sumber data: DPATA 2025 Disdukcapil

Berdasarkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang evesiensi anggaran belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/sj/ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efesiensi Belanja Daerah dalam APBN Tahun 2025, terdapat penurunan anggatan sebesar Rp.286.308.500 atau sebesar 2,66% dari pagu anggaran awal sebesar Rp.5.052.707.571.

a. Faktor penghambat pelaksanaan realisasi kinerja,

Faktor penghambat pelaksanaan realisasi kinerja adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kepemilikan KIA baru tercapai sebesar 63,12 % disebabkan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana (Ribbon untuk cetak KIA);
2. Sebagian besar sarana dan prasana yang ada saat ini sudah habis umur ekonomis dan tidak layak pakai;

b. Faktor pendorong keberhasilan kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan survei indeks kepuasan masyarakat dengan capaian kinerja 100 % mengenai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan (IKM);
2. Diterapkannya inovasi pada layanan administrasi kependudukan dengan nilai kematangan inovasi 79;
3. Telah tercapai perekaman KTP el sebesar 97,53 % karena adanya unit kerja layanan (UKL) disetiap kecamatan yang ada di Kab. Pesisir Selatan yang memangkas jarak tempuh jika harus datang ke kantor Dinas Dukcapil yang ada di Kota Painan;
4. Telah dilaksanakannya Inovasi JEBOL PER SISWA (JEmput BOLA PERekaman SISWA) bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan seluruh SLTA;
5. Tercapainya kepemilikan Kartu Keluarga sebesar 99,70 karena telah dilaksanakannya Inovasi SALAM SAPA KEPINTU RUMAH, Inovasi MELISA (Melayani peduli lanjut usia), Inovasi PEDULI DISABILITAS;
6. Tercapainya kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun, karena telah dilaksanakannya Inovasi SELAMAT LAHIR (Setelah Lahir Mendapat AkTa keLAHIRan).

Dalam perencanaan strategis, evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan

sistem Administrasi Negara Kesatuan RI. Dengan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi Pemerintah dapat menyelaraskan visinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada Bab II ini akan dipaparkan tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2025 dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang termuat pada tabel berikut:

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Sampai dengan tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (renja) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d tahun tahun berjalan	
					Target Renja tahun (n- 2)	Realisasi Renja tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator Program	: Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	40%		100%			80%
2.12.01.2.01	Perencana, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Indikator Kegiatan	: Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	54	24	8	100%	8	48	44%
2.12.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Indikator	: Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.01.02	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Indikator	: Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	44	16	8	100%	8	32	54%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (renja) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d tahun tahun berjalan	
						Target Renja tahun (n- 2)	Realisasi Renja tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Indikator Kegiatan	: Persentase tertib administrasi keuangan	100%	40%			100%			80%
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Indikator	: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2100	723	280	274	97,86%	280	1.277	60,81%
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Indikator	: Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	60	24	12	12	100%	12	48	80%
2.12.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Indikator Kegiatan	: Persentase tertib administrasi umum	100%	40%			100%			80%
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik	Indikator	: Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	11	2	1	1	100%	4	7	63,63%
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Indikator	: Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	0	0	0	-	2	2	33,33%
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Indikator	: Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.	11	2	1	1	100%	4	7	63,66%
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Indikator	: Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.	11	2	1	1	%	4	7	63,66%

2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator	:	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.	15	6	3	3	100%	3	12	80%
2.12.01.2.06.0008	Fasilitas kunjungan tamu	Indikator	:	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60	24	12	12	100%	12	48	80%
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Indikator	:	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	24	12	12	100%	12	48	80%
2.12.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator	:	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100%	40%			100%			80%
2.12.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Indikator	:	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	18	4	5	5	100%	5	14	77,77%
2.12.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator	:	Persentase Ketersesuaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	40%	20%	20%	100	20%	80%	80%
2.12.01.208.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator	:	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	24	12	12	100%	12	48	80%
2.12.01.208.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator	:	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60	24	12	12	100%	12	48	80%
2.12.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator	:	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	40%	20%	20%	100%	20%	80%	80%
2.12.01.209.00001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Perorangan	Indikator	:	Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat yang dipelihara.	5	2	1	1	100%	1	4	80%

	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
2.12.01.209.000.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Indikator	:	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara.	110	44	22	22	100%	22	88	80%
2.12.01.209.000.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Indikator	:	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	110	44	22	22	100%	22	88	80%
2.12.01.209.000.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Indikator	:	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihararehab.	5	2	1	1	100%	1	4	80%
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Indikator Program	:	Rasio Penduduk Ber KTP	0,98	0,97	0,98	0,99	101,02%	0,97	0,97	100%
			:	Rasio Penduduk yang memiliki KIA	71	40,09	62	62,54	100,87%	63	55,81	78,61%
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Indikator Kegiatan	:	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	90%	80%	87	87,39	100,45	88	87,82	99,76%
2.12.02.2.01.00.07	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Indikator	:	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	60	24	12	12	100%	12	48	80%
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Indikator Program	:	Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil	0,995	0,996	0,996	0,996	100%	0,996	0,997	100%
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Indikator Kegiatan	:	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	90%	80%	87	87,39	100,45	88	87,82	99,76%
2.12.03.2.01.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Indikator	:	Jumlah laporan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	60	24	12	12	100%	12	48	80%

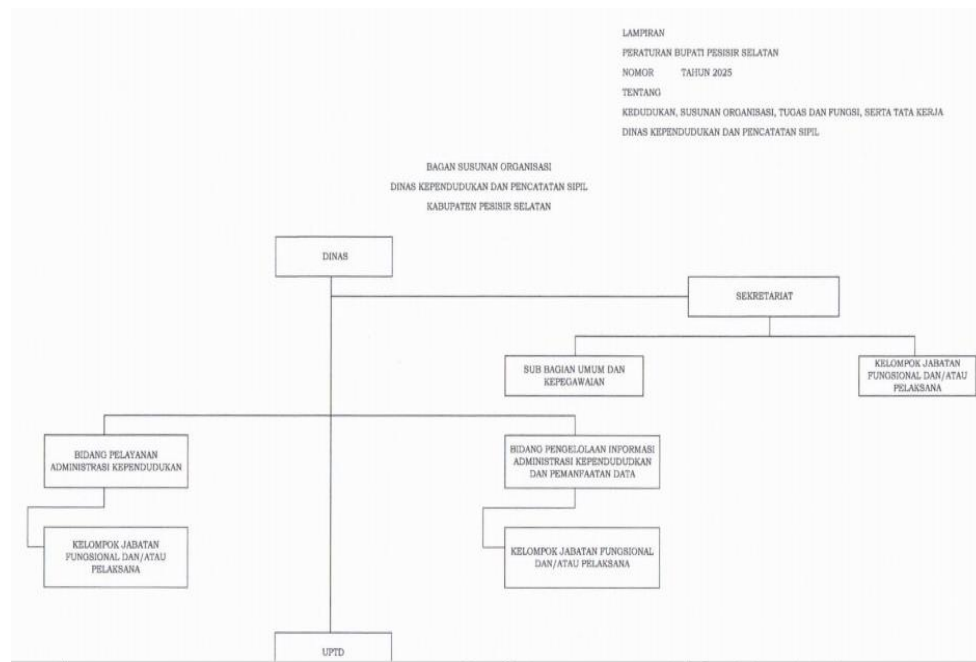
2.12.04	PROGRAM PEGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Indikator Program	:	Persentase Penurunan Data Kependudukan yang bermasalah	98	95	96	96	100%	96,5	96,5	98%
2.12.04.2.01	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Indikator Kegiatan	:	Persentase Pengolah data dalam kondisi baik	90%	80%	87	87,39	100,45	88	87,82	99,76%
2.12.04.2.01.01	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Indikator	:	Jumlah laporan hasil fasiliasi pengelolaan informasi administrasikependu- kan	60	24	12	12	100%	12	48	60%
2.12.05	PROGRAM PEGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Indikator Program	:	Dokumen Profil Kependudukan yang dihasilkan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Indikator Kegiatan	:	Persentase Validitas database kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan	Indikator	:	Jumlah profil kependudukan yang diterbitkan	5	2	1	1	100%	1	4	80%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan:
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pengelola Informasi, Administrasi Kependudukan;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. UPTD

[RENCANA KERJA TAHUN 2026]	Page 16
----------------------------	---------



Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan. Tujuan utama perubahan Undang-Undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana lampirannya tentang Pembagian Urusan Pemerintahan konkrue Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Kabupaten/Kota yang harus dilaksanakan yaitu :

- Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- Pelayanan Pencatatan Sipil;
- Pengumpulan data kependudukan sekaligus pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota; dan
- Penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota.

Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:

1. Penerbitan kartu keluarga;
2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
3. Penerbitan kartu identitas anak (KIA);
4. Penerbitan surat keterangan pindah WNI;
5. Penerbitan surat keterangan datang WNI;
6. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran;
7. Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil;
8. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian;
9. Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan;
10. Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
11. Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan;

12. Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran;
13. Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pelaporan Kematian;
14. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian;
15. Pencatatan dan penerbitan surat keterangan pembatalan perceraian;
16. Pencatatan pengangkatan anak;
17. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak;
18. Penerbitan kutipan akta pencatatan sipil;
19. Legalisasir dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
20. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;
21. Surat Keterangan Tempat Tinggal
22. Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Jenis-jenis pelayanan inilah yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam kapasitasnya sebagai institusi pelayananan publik khususnya bidang Administrasi Kependudukan (permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil).

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi		89	90	90	90	89,49	89,90	90	85,20	
2.	Nilai Kematangan Inovasi PD			100	100	80	81	87	66	79	81	
3.	Indeks kepuasan Masyarakat			84	84	84	84	90,99	91,50	92	8	
4.	Cakupan Layanan Adminduk dan Capil			47	47	47	47	100	92,31	93	93,05	
5.	Rasio Penduduk ber KTP			0,995	0,996	0,996	0,997	0,993	0,995	0,996	0,997	
6.	Cakupan Penerbitan KTP Elektronik			97	97,5	97,6	97,8	97,07	99,59	97,37	97,8	
7.	Cakupan Perekaman KTP el		√	97,50	97,55	97,60	97,65	97,51	99,59	97,37	97,65	
8.	Jumlah Anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA		√	40	50	60	62	40,09	62,54	55,81	62	
9.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran		√	99,10	99,20	99,30	99,40	99,36	99,39	99,75	99,80	
10.	Jumlah OPD yang telah memiliki memanfaatkan data kependudukan		√	6	7	7	10	6	7	7	10	
11.	Dokumen Profil kependudukan yang dihasilkan			1	1	1	1	1	1	1	1	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat diturunkan sebagai berikut:

1. Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi kedalam satu sistem, yaitu SIAK.
2. Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem/online.
3. Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi.
4. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, murah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat.
5. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
6. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (penanggulangan kemiskinan, dll).
7. Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib disiapkan: Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dampak permasalahan yang dihadapi berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan capaian program unggulan serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung visi misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Dampak permasalahan yang dapat mempengaruhi arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan seperti Tabel 2.3.

Tabel 2.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
1	Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil belum optimal	Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil masih terpusat di kantor Disdukcapil	Kurangnya jumlah SD yang terampil	Masih perlunya peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mendukung perwujudan dan reformasi birokrasi.
2	Pemanfaatan data kependudukan oleh OPD maupun instansi layanan publik lainnya belum optimal	Terdapat OPD yang belum mengajukan permohonan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan	OPD masih merasa belum memerlukan akses pemanfaatan data kependudukan	
3	Inovasi pada pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil belum optimal	Inovasi hanya terbatas pada sebagian kecil dari seluruh proses pelayanan administrasi kependudukan	Aplikasi SIAK terpusat dari pusat yang merupakan mandatori Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Seluruh Indonesia	

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain:

1. Dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut akan berdampak semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan, kepolisian dan perpajakan.
2. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan penuh atas Pengumpulan data kependudukan sekaligus pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota, dan penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota.
 - b. Adanya pengembangan inovasi Implementasi Identitas Kependudukan Digital yang tengah diuji cobakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat tiga hal yaitu:

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah
3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju

Selanjutnya ketiga hal tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan yang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Pesisir Selatan yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Rancangan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada berdasarkan Rancangan RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan RKPD yang disajikan pada Tabel T.C.31.

Tabel T.C.31
Review Terhadap Rancangan Rencana Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.575.743.106					7.625.964.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pesisir Selatan	Jumlah Inovasi	1	4.320.743.108	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pesisir Selatan	Jumlah Inovasi	1	6.355.964.000	
			Peningkatan Nilai AKIP	0,24				Peningkatan Nilai AKIP	0,24		
			Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai	100%				Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai	100%		
	Perencana, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Pesisir Selatan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dukcapil penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	80-100%	85.000.000	Perencana, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Pesisir Selatan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dukcapil penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	80-100%	95.000.000	
			Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dukcapil penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	80-100%				Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dukcapil penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	80-100%		

			Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan dan pelaporan	80-100%				Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan dan pelaporan	80-100%		
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	25.000.000	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Pesisir Selatan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	28	85.000.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Pesisir Selatan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	24	70.000.000	
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Pesisir Selatan	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	80-100%	2.506.595.070	Administrasi keuangan perangkat daerah	Pesisir Selatan	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	80-100%	4.133.949.000	
			Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan	80-100%				Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan	80-100%		
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Pesisir Selatan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	280	2.409.395.070	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Pesisir Selatan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2100	4.036.749.000	
	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	12	97.200.000	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	60	97.200.000	
	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		terpenuhinya administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah	80-100%				Terpenuhinya Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	80-100%	15.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut		Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan					Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1	15.000.000	
	Administrasi umum perangkat daerah	Pesisir Selatan	Persentase Pelayanan administrasi yang diproses tepat waktu	80-100%	842.400.000	Administrasi umum perangkat daerah	Pesisir Selatan	Persentase tertib administrasi umum	80-100%	440.000.000	

			Nilai Arsip	31					51		
	Penyediaan komponen instalasi listrik	Pesisir Selatan	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	4	6.500.000	Penyediaan komponen instalasi listrik	Pesisir Selatan	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	4	7.000.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pesisir Selatan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	6.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pesisir Selatan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	8.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pesisir Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pesisir Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	4	6.000.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Pesisir Selatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.	4	560.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Pesisir Selatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.	4	60.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pesisir Selatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.	4	10.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pesisir Selatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.	4	18.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.	4	5.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.	4	6.000.000	
	Fasilitas kunjungan tamu	Pesisir Selatan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	4.500.000	Fasilitas kunjungan tamu	Pesisir Selatan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	10.000.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	250.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	300.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis	4	25.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pesisir Selatan	Persentase aset berkategori baik	55%	550.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pesisir Selatan	Persentase aset berkategori baik	55%	190.000.000	
	Pengadaan Mebel	Pesisir Selatan	Jumlah paket mebel yang disediakan			Pengadaan Mebel	Pesisir Selatan	Jumlah paket mebel yang disediakan	4	10.000.000	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20	550.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20	190.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesisir Selatan	Persentase Keteresuaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80-100%	160.078.038	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesisir Selatan	Persentase Keteresuaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80-100%	1.270.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	145.078.038	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	145.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	15.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60	1.125.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesisir Selatan	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	176.670.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesisir Selatan	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100	212.015.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat yang dipelihara.	1	40.690.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat yang dipelihara.	1	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara.	22	95.300.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara.	22	97.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	Pesisir Selatan	Jumlah Mebel yang dipelihara			Pemeliharaan Mebel	Pesisir Selatan	Jumlah Mebel yang dipelihara	20	10.000.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	22	25.800.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	30	40.000.000	

	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihararehab.	1	14.880.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pesisir Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihararehab.	1	66.764.000	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pesisir Selatan	Perekaman KTP Elektronik	97,60	135.000.000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pesisir Selatan	Perekaman KTP Elektronik	97,60	765.000.000	
			Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang memiliki KIA	64,50				Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang memiliki KIA	64,50		
			Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	2,8				Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	2,8		
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pesisir Selatan	Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk	94%	60.000.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pesisir Selatan	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	96%	670.000.000	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan	4	15.000.000	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan pendaftaran penduduk			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan pendaftaran penduduk	4 Dokumen	10.000.000	
	Penyelesaian Masalah Kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk			Penyelesaian Masalah Kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	50 orang	10.000.000	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil peningkatan			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	4 Laporan	65.000.000	

			elayanan pendaftaran penduduk			Penduduk					
	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	4 Laporan	60.000.000	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	4 Laporan	570.000.000	
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Pesisir Selatan	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	80-100%		Penataan Pendaftaran Penduduk	Pesisir Selatan	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	80-100%	5.000.000	
	Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP el, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP el, formulir, dan blangko terkait pendaftan penduduk			Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP el, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP el, formulir, dan blangko terkait pendaftan penduduk		5.000.000	
	Penyelenggaraan Penaftaran Penduduk	Pesisir Selatan	Persentase Penyelenggaraan Penaftaran Penduduk	80-100%		Penyelenggaraan Penaftaran Penduduk	Pesisir Selatan	Persentase Penyelenggaraan Penaftaran Penduduk	80-100%	26.000.000	
	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kab/kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota			Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kab/kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota	4	2.000.000	
	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil peristiwa terkait pendaftaran penduduk			Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil peristiwa terkait pendaftaran penduduk		22.000.000	
	Kerjasama dengan organisasi kem		Jumlah Dokumen Kerjasama dengan Organisasi kemasyarakatan dan perguruan					Jumlah Dokumen Kerjasama dengan Organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pendaftaran penduduk	2 dokumen	2.000.000	

			tinggi terkait pendaftaran penduduk								
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Persentase sumber daya yang mengikuti bimbingan teknis pendaftaran penduduk	90%	75.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Persentase sumber daya yang mengikuti bimbingan teknis pendaftaran penduduk	90%	64.000.000	
	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Pesisir Selatan	Jumlah laporan bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	1 laporan	75.000.000	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Pesisir Selatan	Jumlah laporan bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	1 laporan	64.000.000	
I I I	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pesisir Selatan	Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai	33	60.000.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pesisir Selatan	Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai	33	190.000.000	
			Kepemilikan Akta Kelahiran	99,38				Kepemilikan Akta Kelahiran	99,38		
			Persentase anak usia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	99,20				Persentase anak usia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	99,20		
			Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal	100%				Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal	100%		
			persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	67%				persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	67		
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pesisir Selatan	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	80-100%	60.000.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pesisir Selatan	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	80-100%	105.000.000	

	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	4	60.000.000	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	4	70.000.000	
	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Pesisir Selatan	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	4		Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Pesisir Selatan	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	4	35.000.000	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pesisir Selatan	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	80-100%		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pesisir Selatan	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	80-100%	30.000.000	
	Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengailan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengailan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan			Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengailan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengailan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan	1 lapran	10.000.000	
	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil			Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil	1 laporan	10.000.000	
	Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pencatatan sipil	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen hasil Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pencatatan sipil					Jumlah dokumen hasil Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pencatatan sipil		10.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pesisir Selatan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pesisir Selatan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil	80-100%	55.000.000	
	Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil pembinaan			Pembinaan dan pengawasan terkait	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan	2	55.000.000	

			dan pengawasan pencatatan sipil yang telah dilakukan			pencatatan sipil		pengawasan pencatatan sipil yang telah dilakukan			
I V	PROGRAM PEGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase Informasi data kependudukan yang dimanfaatkan	75%	60.000.000	PROGRAM PEGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pesisir Selatan	Persentase Penurunan Data Kependudukan yang bermasalah	75%	290.000.000	
	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data kependudukan		Persentase Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data kependudukan	80-100%		Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data kependudukan		Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data kependudukan	80-100%	60.000.000	
	Pengelolaan dan Penyajian data Kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan			Pengelolaan dan Penyajian data Kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	21	45.000.000	
	Kerja sama pemanfaatan data kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Kerjasama pemanfaatan data			Kerja sama pemanfaatan data kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Kerjasama pemanfaatan data	15	15.000.000	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pesisir Selatan	Penyelenggaraan an Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	80-100%	60.000.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pesisir Selatan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	80-100%	130.000.000	
	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penerbitan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penerbitan pengelolaan informasi administrasi kependudukan			Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penerbitan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pesisir Selatan	laporan Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penerbitan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1	10.000.000	
	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	4	60.000.000	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	4	35.000.000	

	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	4	25.000.000	
	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan			Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	4	25.000.000	
	Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi			Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	4	25.000.000	
	Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (dokumen)			Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (dokumen)	2 Dokumen	10.000.000	
	Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil yang telah dilakukan			Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil yang telah dilakukan	4	100.000.000	
	Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan			Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	4 laporan	100.000.000	
V	PROGRAM PEGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Pesisir Selatan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	-	-	PROGRAM PEGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Pesisir Selatan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	89	25.000.000	
	Penyusunan Profil Kependudukan	Pesisir Selatan	Persentase Validitas database kependudukan	80-100%	-	Penyusunan Profil Kependudukan	Pesisir Selatan	Persentase Validitas database kependudukan	80-100%	25.000.000	
	Penyediaan data Kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah data kependudukan kabupaten/kota			Penyediaan data Kependudukan	Pesisir Selatan	Jumlah data kependudukan kabupaten/kota	2	5.000.000	

	Penyusunan Profil Data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen profil data kependudukan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan lain	-	-	Penyusunan Profil Data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen profil data kependudukan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan lain	1	20.000.000	
--	---	-----------------	--	---	---	---	-----------------	--	---	------------	--

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Musrenbang yang dilaksanakan tahun 2025 untuk usulan program kegiatan tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan tidak ada usulan-usulan yang disampaikan namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan OPD pendukung Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas yang melaksanakan dasar dari pelayanan dasar yang melaksanakan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu tanda elektronik elektronik, akta kelahiran dan lain-lain. Dokumen kependudukan tersebut merupakan syarakat mutlak yang harus dimiliki oleh penduduk untuk mendapatkan layanan yang ada di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, seperti untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029, maka rumusan arah kebijakan bidang administrasi kependudukan yaitu *Penguatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan* yang mencerminkan gambaran dan peran serta kondisi yang diinginkan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Integrasi sistem;
2. Perluasan Cakupan Layanan;
3. Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Sistem Administrasi Kependudukan; dan
4. Penyempurnaan Regulasi.

Program yang menjadi landasan penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 adalah *Program Tata Kelola Kependudukan*. Program ini merupakan program teknis dengan sasaran terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan. Indikator Kinerja Program yang digunakan dalam rangka pencapaian program strategis tersebut adalah

1. Meningkatnya cakupan layanan pendaftaran penduduk; dan
2. Meningkatnya jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk layanan publik.

Untuk mengimplementasikan program strategis tersebut, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah merumuskan 3 (tiga) kegiatan strategis, yaitu:

1. Pengelolaan, integrasi data dan informasi kependudukan;
2. Pembinaan administrasi kependudukan; dan

3. Pembinaan aparatur kependudukan

Adapun rumusan program berikut sasaran dan indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Ditjen Dukcapil – Kemendagri terkait dengan pengelolaan/pelayanan di daerah, diantaranya adalah Program Tata Kelola Kependudukan dengan Sasaran *Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital* dengan indikator *Jumlah daerah dengan indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil berkategori “sangat baik”* dengan Kegiatan, Sasaran Kegiatan serta Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan Administrasi Kependudukan, Sasaran Kegiatan *Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Administrasi Kependudukan* dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):
 - a.IKK3: *Persentase anak usia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran;*
 - b.IKK4: *Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal;*
 - c.IKK5: *Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah;*
 - d.IKK6: *Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai;*
 - e.IKK8: *Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam layanan adminduk.*
2. Kegiatan Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital, Sasaran Kegiatan *Meningkatnya sistem kependudukan dan pencatatan sipil, serta memperkenalkan identitas digital untuk memungkinkan semua warga negara dan penduduk Indonesia mengakses pelayanan pemerintah dan swasta yang lebih baik* dengan IKK:

- a. IKK8: *Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP*

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan dan sasaran yang digunakan dalam tahapan penyusunan Penetapan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 mengacu pada dokumen RPJMD dan RenstraPerangkat Daerah periode Tahun 2025-2029. Hal ini disebabkan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan periode 2025-2029 yang akan menjadi dokumen yang saling berkaitan dengan Renstra Perangkat Daerah, yang mana saat ini masih dalam tahap penyusunan oleh instansi terkait.

Berdasarkan tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029 adalah “**PESISIR SELATAN MAJU TUMBUH DAN BERKELANJUTAN**” dengan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah **Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas**. Misi ini merupakan misi ke-1 pada RPJMD Tahun 2025-2029, dengan tujuan yang berkaitan langsung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatanyaitu “**Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien**” dengan **Sasaran** sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Dukcapil
2. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan
3. Meningkatnya Pendayagunaan data kependudukan untuk pelayanan publik

Untuk mengimplementasikan misi, tujuan dan sasaran tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan dokumen Renstra Dinas Tahun 2025-2029 memiliki 5 (lima) indikator kinerja yang secara rinci dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
<i>Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien</i>		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	92,5
	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Dukcapil	Nilai AKIP Dukcapil	85,20
		Persentase peningkatan Kepuasan terhadap pelayanan Dukcapil	0,54%
		Nilai Kematangan Inovasi Dukcapil	81
	2. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	61,08%
	3. Meningkatnya Pendayagunaan data kependudukan untuk pelayanan publik	Persentase stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan pks	70%

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2026

Bentuk kongkrit dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran dinas sebagai salah satu unsur pencapaian misi, tujuan dan sasaran kepala daerah, untuk perencanaan Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah merumuskan program, kegiatan berikut pagu indikatif pada tahapan Rancangan Awal Renja Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Program dan Pagu Rancangan Renja
Tahun 2026

KODE REK	PROGRAM	PAGU (Rp)	KET
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan kabupaten/kota	4.320.743.108	6 Kegiatan 17SubKegiatan
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	135.000.000	1 Kegiatan 1 SubKegiatan
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	60.000.000	1 Kegiatan 1SubKegiatan
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60.000.000	1 Kegiatan 1 SubKegiatan
2.12.05	Program Pengelolaan ProfilKependudukan	-	-
JUMLAH		4.575.743.108	9 Kegiatan 20 SubKegiatan

Tabel 3.3
Rumusan rencana program dan kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2026
Kabupaten Pesisir Selatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Renstra)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
2					NONURUSAN								
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				7.625.964.000				9.615.200.000
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	0,97	6.355.964.000	DAU	-	1,06	8.335.200.000
						Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai		80-100%			80	100%	
						Jumlah Inovasi		1				1	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dukcapil penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Pesisir Selatan	80-100%	95.000.000	DAU	-	80-100%	95.000.000,00
						Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dukcapil penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		80-100%				80-100%	
						Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan dan pelaporan		80-100%				80-100%	
2	12	01	2.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	4 Dokumen	25.000.000	DAU		4 Dokumen	25.000.000

2	12	01	2.01	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	28 Laporan	70.000.000	DAU		28 Dokumen	70.000.000
2	12	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik	Pesisir Selatan	80-100%	4.133.949.000	DAU	-	80-100%	6.144.200.000
2	12	01	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pesisir Selatan	280 orang	4.036.749.000	DAU)		280 orang	6.047.000.000
2	12	01	2.02	00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Pesisir Selatan	12 Dokumen	97.200.000	DAU		12 Dokumen	97.200.000
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	80-100%	15.000.000	DAU	-	80-100%	15.000.000
2	12	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pesisir Selatan	1 Paket	15.000.000	DAU)		1 Paket	15.000.000
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi yang diproses tepat waktu	Pesisir Selatan	80-100%	440.000.000		-	80-100%	443.000.000
						Nilai Arsip	Pesisir Selatan	25,88				31	
2	12	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pesisir Selatan	4 Paket	7.000.000	DAU		4 Paket	8.000.000
2	12	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pesisir Selatan	4 Paket	8.000.000	DAU		4 Paket	9.000.000
2	12	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Pesisir Selatan	1 Paket	6.000.000	DAU		1 Paket	7.000.000
2	12	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pesisir Selatan	4 Paket	60.000.000	DAU		4 Paket	60.000.000
2	12	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pesisir Selatan	4 Paket	18.000.000	DAU		4 Paket	18.000.000

2	12	01	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pesisir Selatan	4 Dokumen	6.000.000	DAU		4 Dokumen	6.000.000
2	12	01	2.06	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pesisir Selatan	4 Laporan	10.000.000	DAU		4 Laporan	10.000.000
2	12	01	2.06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pesisir Selatan	12 Laporan	300.000.000	DAU		12 Laporan	300.000.000
2	12	01	2.06	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (unit)	Pesisir Selatan	4 Dokumen	25.000.000	DAU		4 Dokumen	25.000.000
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset Berkondisi Baik	Pesisir Selatan	80-100%	190.000.000	DAU		80-100%	140.000.000,00
2	12	01	2.07	00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pesisir Selatan	1 Paket	5.000.000	DAU		2 Paket	10.000.000
2	12	01	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pesisir Selatan	20 Unit	185.000.000	DAU		15 unit	120.000.000
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesisir Selatan	80-100%	1.270.000.000		-	80-100%	1.270.000.000
2	12	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pesisir Selatan	12 Laporan	145.000.000	DAU		12 Laporan	145.000.000
2	12	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	1.125.000.000	DAU		12 Laporan	1.125.000.000
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan baik	Pesisir Selatan	80-100%	212.015.000		-	-	228.000.000
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	Pesisir Selatan	1 unit	50.000.000	DAU		1 Unit	50.000.000
2	12	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pesisir Selatan	22 Unit	97.000.000	DAU		2 Unit	97.000.000

2	12	01	2.09	00 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara (unit)	Pesisir Selatan	22 Unit	10.000.000	DAU		25 Unit	20.000.000
2	12	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pesisir Selatan	30 Unit	40.0000.000	DAU		30 Unit	45.0000.000
2	12	01	2.09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pesisir Selatan	1Unit	15.015.000	DAU		1 Unit	16.000.000
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Dig		2,8	765.000.000		-	2,9	775.000.000
						Persentase Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 (sati) hari yang memiliki KIA		64,50				65,70	
						Perekaman KTP el		97,60				98,90	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		80-100%-	670.000.000	DAU	-	80-100%	685.000.000
2	12	02	2.01	00 01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan	Pesisir Selatan	2 Dokumen	15.000.000	DAU		2 Dokumen	15.000.000
2	12	02	2.01	00 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan pendaftaran penduduk	Pesisir Selatan	2 Dokumen	10.000.000	DAU		2 Dokumen	10.000.000
2	12	02	2.01	00 03	Penyelesaian Masalah Kependudukan	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Pesisir Selatan	50 orang	10.000.000	DAU		75 orang	15.000.000
2	12	02	2.01	00 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Pesisir Selatan	4 Laporan	65.000.000	DAU		4 Laporan	65.000.000
2	12	02	2.01	00 07	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Pesisir Selatan	4 Laporan	570.000.000	DAU		4 Laporan	580.000.000

2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk		100%	5.000.000		-	-	5.000.000
2	12	02	2.02	0002	Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP el, formulir dan buku terkait penaftran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan kependudukan selain blangko KTP el, formulir dan buku terkait penaftran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Pesisir Selatan	4 dokumen	5.000.000	DAU		4 dokumen	5.000.000
2	12	02	2.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		100%	26.000.000		-	100%	26.000.000
2	12	02	2.02	0001	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kab/kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota	Pesisir Selatan	1 laporan	2.000.000	DAU		1 laporan	2.000.000
2	12	02	2.03	0002	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Pesisir Selatan	1dokumen	22.000.000	DAU		1dokumen	22.000.000
2	12	02	2.03	0006	Kerjasama dengan organisasi kem	Jumlah Dokumen Kerjasama dengan Organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pendaftaran penduduk	Pesisir Selatan	4 Dokumen	2.000.000	DAU		4 Dokumen	2.000.000
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		80-100%	64.000.000		-	80-100%	59.000.000
2	12	02	2.04	0003	BimbinganTeknisterkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan HasilBimbinganTeknis TerkaitPendaftaran Penduduk	Pesisir Selatan	1Laporan	64.000.000	DAU		1Laporan	59.000.000
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai		33	190.000.000		-	33	190.000.000
						Kepemilikan Akta Kelahiran		99,38				99,38	
						Persentase anak usia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran		99,20				99,20	
						Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang		100%				100%	

						meninggal							
						persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah		67%				67%	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil		-	105.000.000		-	-	105.000.000
2	12	03	2.01	00 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Pesisir Selatan	4 Laporan	70.000.000	DAU		4 Laporan	70.000.000
2	12	03	2.01	00 02	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Pesisir Selatan	4 layanan	35.000.000	DAU		4 layanan	35.000.000
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		80-100%	30.000.000		-	80-100%	30.000.000
2	12	03	2.02	00 01	Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengailan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengailan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan	Pesisir Selatan	1Laporan	10.000.000	DAU		1Laporan	10.000.000
2	12	03	2.02	00 03	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil	Pesisir Selatan	1Laporan	10.000.000	DAU		1Laporan	10.000.000
2	12	03	2.02	00 09	Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pencatatan sipil	Jumlah dokumen hasil Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pencatatan sipil	Pesisir Selatan	1 Dokumen	10.000.000	DAU		1 Dokumen	10.000.000
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil		-	55.000.000		-	-	55.000.000

2	12	03	2.03	00 04	Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil yang telah dilakukan	Pesisir selatan	1Laporan	55.000.000	DAU			55.000.000
2	12	04			PROGRAM PEGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi data kependudukan yang dimanfaatkan	Pesisir selatan	75%	290.000.000	DAU		80%	290.000.000
2	12	04	2.01		Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data kependudukan	Persentase Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data kependudukan	Pesisir selatan	-	60.000.000	DAU	-	-	63.000.000
2	12	04	2.01	0001	Pengelolaan dan Penyajian data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Pesisir selatan	21 dokumen	45.000.000	DAU	-	21 dokumen	45.000.000
2	12	04	2.01	00 02	Kerja sama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama pemanfaatan data	Pesisir selatan	15 Dokumen	15.000.000	DAU		18 Dokumen	18.000.000
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pesisir selatan	80-100%	130.000.000	DAU)		80-100%	130.000.000
2	12	04	2.03	0001	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penerbitan pengelolaan informasi adminstrasi kependudukan	Jumlah laporanKoordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penerbitan pengelolaan informasi adminstrasi kependudukan	Pesisir selatan	1 laporan	10.000.000	DAU	-	1 laporan	10.000.000
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pesisir selatan	4 laporan	35.000.000	DAU		4 laporan	35.000.000
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Pesisir selatan	4 dokumen	25.000.000	DAU		4 dokumen	25.000.000

2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pesisir selatan	4 laporan	25.000.000	DAU		4 laporan	25.000.000
2	12	04	2.03	0006	Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	Jumlah dokumen Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	Pesisir selatan	4 dokumen	25.000.000	DAU		4 dokumen	25.000.000
2	12	04	2.03	0008	Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah dokumen data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (dokumen)	Pesisir selatan	4 dokumen	10.000.000	DAU		4 dokumen	10.000.000
2	12	04	2.04		Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	Persentase Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil		80-100%	100.000.000			80-100%	97.000.000
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pesisir selatan	4 laporan	100.000.000	DAU		4 laporan	97.000.000
2	12	05			PROGRAM PEGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan		80-100%	25.000.000			80-100%	25.000.000
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Validitas database kependudukan			25.000.000				25.000.000
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan data Kependudukan	Jumlah data kependudukan kabupaten/kota	Pesisir selatan	2 laporan	5.000.000	DAU		2 laporan	5.000.000
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan lainnya	Jumlah dokumen Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan lainnya	Pesisir Selatan	1 dokumen	20.000.000	DAU		1 dokumen	20.000.000
JUMLAH									7.625.964.000				9.615.200.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 merupakan penjabaran kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk indikasi program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2026. Hal ini tidak lain dalam rangka menyelesaikan isu dan permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan tugas pokok dan fungsi kelembagaan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset serta barang daerah sebagai operasionalisasi pencapaian visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2026 sudah disesuaikan dengan target dan capaian Renstra dan RPJMD.

Pada Renja Perubahan tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Program dan Kegiatan sebagai berikut:

a. Program sebanyak 3, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

b. Kegiatan sebanyak 8, yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Peanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah;
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah;
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

8. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

c. Sub Kegiatan sebanyak 19, yaitu :

1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Penyediaan Administrasi dan Pelaksanaan tugas ASN
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
7. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan
9. Fasilitasi Kunjungan Tamu
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
11. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
18. Penerbitan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
19. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PENDANAAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2026

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Pendanaan Tahun 2026				Catatan Penting	Rencana Pendanaan Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
2					NONURUSAN								
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.541.079.062				9.615.200.000
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	0,97	5.388.468.562	DAU	-	1,06	8.335.200.000
						Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai		80-100%			80	100%	
						Jumlah Inovasi		1				1	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dukcapil penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Pesisir Selatan	80-100%	39.809.000	DAU	-	80-100%	95.000.000,00
						Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dukcapil penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		80-100%				80-100%	
						Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan dan pelaporan		80-100%				80-100%	
2	12	01	2.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	4 Dokumen	-	DAU		4 Dokumen	25.000.000

2	12	01	2.01	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	28 Laporan	39.809.000	DAU		4 Dokumen	70.000.000
2	12	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik	Pesisir Selatan	80-100%	2.470.719.062	DAU	-	80-100%	6.144.200.000
2	12	01	2.02	00 01	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pesisir Selatan	280 orang	2.357.079.062	DAU)		280 orang	6.047.000.000
2	12	01	2.02	00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Pesisir Selatan	12 Dokumen	113.640.000	DAU		12 Dokumen	97.200.000
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	80-100%	-	DAU	-	80-100%	15.000.000
2	12	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pesisir Selatan	1 Paket	-	DAU)		1 Paket	15.000.000
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi yang diproses tepat waktu	Pesisir Selatan	80-100%	1.042.861.499		-	80-100%	443.000.000
						Nilai Arsip	Pesisir Selatan	31				51	
2	12	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pesisir Selatan	4 Paket	6.227.441	DAU		4 Paket	8.000.000
2	12	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pesisir Selatan	4 Paket	12.180.000	DAU		4 Paket	9.000.000
2	12	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Pesisir Selatan	1 Paket	-	DAU		1 Paket	7.000.000
2	12	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pesisir Selatan	4 Paket	824.858.658	DAU		4 Paket	60.000.000

2	12	01	2.06	00 05	Penyediaan BarangCetakandanPeng- andaan	Jumlah Paket Barang Cetakandan Penggandaan yangDisediakan	Pesisir Selatan	4 Paket	14.131.900	DAU		4 Paket	18.000.000
2	12	01	2.06	00 06	PenyediaanBahanBacaa ndanPeraturanPerundan g-Undangan	Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang- UndanganyangDisediakan	Pesisir Selatan	4 Dokumen	3.600.0000	DAU		4 Dokumen	6.000.000
2	12	01	2.06	00 08	Fasiitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Pesisir Selatan	4 Laporan	5.940.000	DAU		4 Laporan	10.000.000
2	12	01	2.06	00 09	Penyelenggaraan RapatKoordinasidanKon sultasiSKPD	Jumlah LaporanPenyelenggaraa n RapatKoordinasidanKon sultasiSKPD	Pesisir Selatan	12 Laporan	175.923.500	DAU		12 Laporan	300.000.000
2	12	01	2.06	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (unit)	Pesisir Selatan	4 Dokumen	-	DAU		4 Dokumen	25.000.000
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Aset Berkondisi Baik	Pesisir Selatan	55%	390.454.000	DAU		60%	140.000.000,00
2	12	01	2.07	00 05	PengadaanMebel	Jumlah Paket Mebel yangDisediakan	Pesisir Selatan	1Paket	-	DAU		2 Paket	10.000.000
2	12	01	2.07	00 06	PengadaanPeralatandan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan	Pesisir Selatan	33 Unit	390.454.000	DAU		15 unit	120.000.000
2	12	01	2.08		Penyediaan JasaPenunjangUrusan PemerintahanDaerah	Terpenuhinya Jasa Penunjnag Urusan Pemerintah Daerah	Pesisir Selatan	80-100%	1.244.425.001		-	80-100%	1.270.000.000
2	12	01	2.08	00 02	Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	JumlahLaporanPenyediaanJ asa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan	Pesisir Selatan	12 Laporan	180.733.670	DAU		12 Laporan	145.000.000
2	12	01	2.08	00 04	Penyediaan JasaPelayananUmumKa ntor	Jumlah Laporan PenyediaanJasaPelayananU mumKantoryang Disediakan	Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	1.063.691.331	DAU		12 Laporan	1.125.000.000
2	12	01	2.09		Pemeliharaan BarangMilikDaerahPenu njangUrusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan baik	Pesisir Selatan	80-100%	200.200.000		-	-	228.000.000

2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	Pesisir Selatan	1 unit	40.100.000	DAU		1 Unit	50.000.000
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pesisir Selatan	22 Unit	99.050.000	DAU		2 Unit	97.000.000
2	12	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara (unit)	Pesisir Selatan	22 Unit	-	DAU		25 Unit	20.000.000
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pesisir Selatan	30 Unit	11.450.000	DAU		30 Unit	45.000.000
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pesisir Selatan	1 Unit	49.600.000	DAU		1 Unit	16.000.000
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital		2,8	104.990.500		-	2,9	775.000.000
						Persentase Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		64,50				65,70	
						Perekaman KTP el		97,60				98,90	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		80-100%-	104.990.500	DAU	-	80-100%	675.000.000
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan	Pesisir Selatan			DAU		2 Dokumen	15.000.000
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan pendaftaran penduduk	Pesisir Selatan			DAU		2 Dokumen	10.000.000
2	12	02	2.01	0003	Penyelesaian Masalah Kependudukan	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Pesisir Selatan			DAU		75 orang	15.000.000

2	12	02	2.01	00 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Pesisir Selatan	4 Laporan	104.990.500	DAU		4 Laporan	35.000.000
2	12	02	2.01	00 07	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Pesisir Selatan			DAU		4 Laporan	580.000.000
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk			--		-	-	5.000.000
2	12	02	2.02	0000 2	Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP el, formulir dan buku terkait penaftran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan kependudukan selain blangko KTP el, formulir dan buku terkait penaftran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Pesisir Selatan		-	DAU		4 dokumen	5.000.000
2	12	02	2.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Penyelenggaraan Persentase Pendaftaran Kependudukan			-		-	-	26.000.000
2	12	02	2.02	00 01	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kab/kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota	Pesisir Selatan		-	DAU		1 laporan	2.000.000
2	12	02	2.03	00 02	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Pesisir Selatan		-	DAU		1dokumen	22.000.000
2	12	02	2.03	00 06	Kerjasama dengan organisasi kem	Jumlah Dokumen Kerjasama dengan Organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pendaftaran penduduk	Pesisir Selatan		-	DAU		4 Dokumen	2.000.000
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			-		-	80-100%	59.000.000

2	12	02	2.04	00 03	BimbinganTeknisterkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan HasilBimbinganTeknis TerkaitPendaftaran Penduduk	Pesisir Selatan		-	DAU		1Laporan	59.000.000
2	12	03			PROGRAMPENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai		33	-		-	33	190.000.000
						Kepemilikan Akta Kelahiran		99,38				99,38	
						Persentase anak usia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran		99,20				99,20	
						Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal		100%				100%	
						persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah		67%				67%	
2	12	03	2.01		Pelayanan PencatatanSipil	Persentase Pelayanan PencatatanSipil					-	-	105.000.000
2	12	03	2.01	00 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Pesisir Selatan			DAU		4 Laporan	70.000.000
2	12	03	2.01	00 02	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Pesisir Selatan			DAU)		4 layanan	35.000.000
2	12	03	2.02		PenyelenggaraanPencat atan Sipil	Persentase PenyelenggaraanPencatata n Sipil					-	80-100%	30.000.000
2	12	03	2.02	00 01	Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan	Pesisir Selatan			DAU		1Laporan	10.000.000

2	12	03	2.02	00 03	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil	Pesisir Selatan			DAU		1Laporan	10.000.000
2	12	03	2.02	00 09	Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pencatatan sipil	Jumlah dokumen hasil Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pencatatan sipil	Pesisir Selatan			DAU		1 Dokumen	10.000.000
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil					-	-	55.000.000
2	12	03	2.03	00 04	Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil yang telah dilakukan	Pesisir selatan			DAU			55.000.000
2	12	04			PROGRAM PEGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi data kependudukan yang dimanfaatkan	Pesisir selatan	75%	47.620.000	DAU		80%	290.000.000
2	12	04	2.01		Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data kependudukan	Persentase Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data kependudukan	Pesisir selatan	-	-	DAU	-	-	63.000.000
2	12	04	2.01	0001	Pengelolaan dan Penyajian data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Pesisir selatan			DAU	-	21 dokumen	45.000.000
2	12	04	2.01	00 02	Kerja sama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama pemanfaatan data	Pesisir selatan			DAU		18 Dokumen	18.000.000

2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pesisir selatan	80-100%	49.920.000	DAU)		80-100%	130.000.000
2	12	04	2.03	0001	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penerbitan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penerbitan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pesisir selatan			DAU	-	1 laporan	10.000.000
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pesisir selatan	4 laporan	47.620.000	DAU		4 laporan	35.000.000
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Pesisir selatan		-	DAU		4 dokumen	25.000.000
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pesisir selatan		-	DAU		4 laporan	25.000.000
2	12	04	2.03	0006	Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	Jumlah dokumen Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	Pesisir selatan			DAU		4 dokumen	25.000.000
2	12	04	2.03	0008	Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah dokumen data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (dokumen)	Pesisir selatan			DAU		4 dokumen	10.000.000
2	12	04	2.04		Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	Persentase Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil						80-100%	97.000.000
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pesisir selatan			DAU		4 laporan	97.000.000
					PROGRAM PEGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan						80-100%	25.000.000

2	12	05			Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Validitas database kependudukan							25.000.000
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan data Kependudukan	Jumlah data kependudukan kabupaten/kota	Pesisir selatan			DAU		2 laporan	5.000.000
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan lainnya	Jumlah dokumen Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan lainnya	Pesisir Selatan			DAU		1 dokumen	20.000.000

Berdasarkan rumusan program, kegiatan, sub kegiatan yang telah disusun pada Penetapan Renja Tahun 2026 yang mengacu kepada dokumen Renstra 2025-2029, diharapkan mampu merealisasikan target- target kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pendanaan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
	Tujuan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	92,5		
1.	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dukcapil	Nilai AKIP Perangkat Daerah	85,20	Program Penunjang Urusan	5.388.468.062
		Persentase peningkatan Kepuasan terhadap pelayanan Dukcapil	0,54%	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		Nilai Kematangan Inovasi Dukcapil	81		
2.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Kependudukan	61,08%	Program Pendaftaran Penduduk	104.990.500
				Program Pencatatan Sipil	-
3	Meningkanya Pendayagunaan data kependudukan untuk pelayanan publik	Persentase Stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	70%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	47.620.000
				Program Profil Kependudukan	-
	Jumlah				5.541.079.062

Berdasarkan tabel 4.2 pendanaan Program Indikator Kinerja Utama diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Belanja Pegawai Rp. 2.357.079.062,00
2. Belanja Modal Rp. 402.634.000,00
3. Belanja Operasional Rp. 2.781.366.000,00

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 ini disusun berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertuang dalam Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga Rencana Kerja Perubahan yang merupakan perencanaan satu tahun kedepan dan dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana kerja tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen perencanaan yang penting yang dipedomani sebagai arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan perubahan tahun 2026 dilingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun demikian rencana kerja ini bukanlah dokumen yang bersifat kaku dan terbatas, melainkan dokumen yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan sesuai dengan pertimbangan kebutuhan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Diharapkan dengan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan baik yang menjadi penjabaran atas Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintahan Pusat.

Untuk menjamin keberhasilan Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) maka perlu dilakukan Langkah kaidah pelaksanaan sebagai berikut ini:

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;

2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika Perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan selain menjadi pelaksanaan kegiatan tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Tahun 2026 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Renja berikutnya.

Melalui Rencana Kerja ini diharapkan agar setiap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mampu melakukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui pemahaman tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras.

Akhir kata dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian misi Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu

“wujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”.

Dengan mengharapakan keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja tahun 2026 yang telah dibuat dapat diwujudkan.

Painan, 10 November 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



BERISKHAN, S.Sos.M.Si

NIP 19720302 199302 1 001

